MAKNA PENGEMBANGAN KEKUATAN MILITER CINA

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Beberapa waktu lalu Presiden Cina Hu Jintao dalam pidatonya pada Kongres ke-17 Partai Komunis Cina menyatakan untuk segera dilakukan pengembangan kemampuan militer Cina yang berteknologi tinggi. Secara eksplisit pemimpin Partai Komunis Cina tersebut juga mengkonfirmasikan bahwa lima tahun ke depan sasaran strategis pengembangan kekuatan militer Cina yakni membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi dan unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi serta didukung oleh prajutit bermutu tinggi dalam jumlah besar.

Pemimpin Partai Komunis Cina tersebut menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) hanya berupaya mempercepat proses modernisasi militernya dan tidak akan pernah terlibat dalam perlombaan senjata maupun mengancam negara manapun. Hu Jintao menekankan sifat peranan angkatan bersenjata Cina adalah untuk bertahan dan hanya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara tersebut. Namun, masyarakat internasional termasuk negara-negara di kawasan Asia-Pasifik tetap khawatir akan ambisi peningkatan kemampuan militer Cina. Hal itu dikarenakan pergeseran perimbangan kekuatan dalam era paska Perang Dingin terjadi bersamaan dengan tampilnya Cina sebagai kekuatan politik dan militer khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Pertanyaannya kini adalah apa makna strategis dari upaya peningkatan kekuatan militer Cina?. Faktor-faktor apa yang diperhitungkan dalam kebijakan Cina tersebut? Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan membatasi diri dari perspektif strategis perkembangan pemikiran pertahanan Cina

*****

Pergeseran Pemikiran Pertahanan Cina

Perkembangan pemikiran pertahanan Cina moderen bermula pada dekade 1930-an dan 1940-an yang lebih mengedepankan pada dua komponen strategi, yakni pertahanan teritorial atau darat (*territorial defense*) dan pertahanan pantai (*coastal defense*). Saat itu bagi Cina, esensi pertahanan keamanan adalah seperti yang termuat dalam doktrin "Perang Rakyat" (*People's War*). Secara implisit "Perang Rakyat" mengandalkan unsur manusia, operasi infranteri, dan perang gerilya. Bahkan dalam konsepsi Mao Zedong, perang gerilya inilah yang menjadi inti dari strategi pertahanan . Maka itu sampai awal tahun 1980-an strategi

pertahanan pantai hanya menjadi komponen kedua dalam strategi pertahanan nasional Cina. Kedua strategi pertahanan Cina di atas tidak terlepas dari kebutuhan lingkungan strategis saat itu yakni untuk menangkal ancaman berupa agresi konvensional dan menghadang musuh di perbatasan.

Sejak awal tahun 1980-an Cina menerapkan strategi "pertahanan aktif" (*jiji fangyu*) yang selaras dengan upaya pembangunan ekonomi "lompatan jauh ke depan" yang dicanangkan Deng Xiaoping. Secara demikian kebijakan pertahanan Cina harus disubordinasikan pada dan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, Doktrin "pertahanan aktif" dimaksudkan untuk menghadapi tiga jenis perang, yakni: perang dunia; perang skala luas dalam menghadapi agresi negara asing terhadap Cina; dan konflik perbatasan atau perang terbatas. Dari ketiga kemungkinan perang tesebut sejak pertengahan tahun 1980-an para elit strategi Cina yakin bahwa jenis perang ketiga yang akan mungkin terjadi. Karena itu sampai saat ini berbagai simulasi strategi perang-perang regional dan terbatas (*youxian zhubu zhanzheng*) kerap dikembangkan Cina.

Menjelang akhir 1980-an strategi pertahanan Cina mulai memperhitungkan arti penting pertahanan maritim dan udara dalam doktrin pertahanan aktif melalui pengenalan "strategi pertahanan air hijau" (*jijide jinhai fangyu zhanlie*). Strategi pertahanan ini melakukan restrukturisasi prioritas pengembangan angkatan bersenjata dari ketiga kekuatan matra udara, laut dan darat dalam upaya membangun kemampuan gerak cepat (*rapid response capability*) untuk menghadapi perang-perang regional dan terbatas atau konflik intensitas rendah (*low intensity conflicts*) di sekitar wilayah Cina.

Lebih lanjut, pada awal tahun 1990-an doktrin pertahanan aktif kembali direvisi. Secara eksplisit angkatan bersenjata Cina menetapkan prioritas pengembangan pada angkatan laut dan udara. Militer didorong untuk melaksanakan kontruksi kualitatif militer, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan operasi militer yang dikombinasikan dengan teknologi persenjataan yang tinggi. Doktrin modernisasi kualitas militer ini menjadi filosofi yang melandasi pengembangan militer Cina sejak tahun 1992 sampai saat ini.

Secara demikian dapat dikaji bahwa keinginan Presiden Hu Jintao kali ini untuk meningkatan kekuatan militer Cina merupakan implementasi dari doktrin pertahanan aktif dan konstruksi kualitatif militer yang menjadi landasan strategi pertahanan periferal dan proyeksi masa depan (*forward projection*) dalam rangka mengantisipasi perang-perang regional dan terbatas.

Hal itu dapat terlihat dari besarnya perhatian Cina terhadap pembentukan unit-unit tempur taktis, pengembangan kekuatan angkatan laut dan udara serta pengembangan kualitas dan

teknologi persenjataan melalui program penelitian dan pengembangan yang intensif. Kemudian, meningkatnya perhatian Cina terhadap perang-perang intensitas rendah mendorongnya untuk mengembangkan unit-unit pasukan gerak cepat (*Rapid Reaction Units*) atau *kuaisu budui* untuk mengamankan kepentingan-kepentingan maritim dan klaim-klaim territorial dan lepas pantainya. Cina juga banyak mempelajari pengalaman negara-negara lain seperti AS, Perancis, dan Inggris dalam mengembangkan pasukan gerak cepat, khususnya yang berkenaan dengan daya guna unit-unit pasukan gerak cepat dalam menghadapi pertempuran dengan calon agresor, terorisme, dan kekacauan di dalam negeri.

Sebenarnya pengembangan pasukan gerak cepat yang bermutu tinggi ini, seperti yang ditulis You Xu dan You Ji dalam artikelnya *"In Search of Blue Water Power: The PLA Navy's Maritime Strategy in the 1990s and Beyond"*, tidak lepas dari strategi besar Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) dalam dua dekade pertama abad ke-21. Pada kurun waktu ini Angkatan Laut Cina diharapkan sudah mampu menjelajah seluruh lautan dunia. Pada tahap pertama, satuan-satuan pasukan gerak cepat yang dikembangkan akan didampingi oleh *aircraft carriers* dan membentuk sistem penyerangan dan pertahanan tiga dimensi yang terdiri dari perlengkapan serang udara, permukaan, dan kapal selam. Pada tahap kedua, pengembangan peralatan perang berteknologi tinggi akan diterapkan pada seluruh angkatan bersenjata Cina. Diharapkan setelah tahun 2020 Cina akan menjadi kekuatan laut yang handal dan berskala global.

Implikasi bagi Perimbangan Strategis di Kawasan

Tak pelak lagi pada tataran makro strategi, upaya Cina untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat berimplikasi pada perimbangan strategis di kawasan. Tingkah laku Cina, sebagai sebuah entitas negara bangsa di Asia-Pasifik, sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal terutama sikap dan kebijakan Amerika Serikat dan para sekutu AS seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia baik secara individu maupun gabungan. Dengan kata lain secara hipotetis faktor Cina dalam hubungan segitiga AS - Cina – sekutu AS akan menentukan lingkungan politik, keamanan dan ekonomi kawasan Asia-Pasifik.

Misalnya, menjelang abad ke-21 Cina merasa gerah dengan ditandatanganinya Deklarasi Aliansi Keamanan untuk abad ke-21 antara AS dan Jepang. Tampaknya upaya modernisasi kekuatan militer Cina kali ini akan lebih mempercepat upaya AS dan sekutunya dalam mewujudkan keberadaan strategi pertahanan "Perang Bintang (*Star Wars*) yang digabungkan dengan rencana pembangunan sistem pertahanan rudal nasional (*national missile defense*

system) di wilayah nasional setiap negara sekutu AS seperti di Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Australia yang sudah dimulai sejak awal tahun 2003.

Cina berpendapat bahwa aliansi keamanan abad ke-21 AS-Jepang bersifat *anachronistic* yang seharusnya tidak ada seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin. Untuk meminimalisir dan bahkan meniadakan keberadaan aliansi sekutu AS ini Cina menjalankan strategi diplomatik menjalin hubungan militer lebih erat dengan Rusia dan mendukung penuh rezim keamanan multilateral di kawasan Asia-Pasifik yakni *ASEAN Regional Forum* (ARF). Kemudian, di bidang ekonomi Cina juga secara maksimal menjalin Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral (*Bilateral Free trade Agreement*) dengan beberapa negara anggota ASEAN.

Kondisi ini telah memaksa Cina untuk mempercepat proses modernisasi sistem pertahanannya. Karena itu tidak mengherankan apabila yang sangat pertama kali dibidik Cina pada awal tahun 2007 ini adalah kemampuan menembak sasaran musuh di ruang angkasa. Hal itu dikarenakan dalam kalkulasi militer baik strategi pertahanan Perang Bintang maupun sistem pertahanan rudal nasional AS dan sekutu-sekutunya hanya dapat dipatahkan secara dini di luar angkasa. Kemudian menjelang akhir tahun 2007, sebagai awal tahun pamungkas dari *grand strategy* pertahanan Cina, elit pemikir strategi pertahanan Cina mengajukan upaya pengembangan angkatan bersenjata Cina yang unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi.

Kondisi lingkungan strategis seperti itu membuka peluang adanya perlombaan senjata di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Pada titik ini, tampaknya ASEAN, sebagai salah satu komponen penting dalam rancang bangun keamanan Asia-Pasifik, tidak dapat menghindar dari akibat-akibat perubahan yang terjadi di lingkungan strategisnya. Paling tidak, ASEAN tetap harus mempertahankan multilateralisme keamanan di Asia-Pasifik yang dapat mengekang ambisi hegemoni dari negara-negara besar di luar ASEAN. Langkah ini cukup penting dalam rangka upaya membangun sikap saling percaya (*Confidence Building Measures/CSBMs*) di Asia-Pasifik. Dalam hal ini Indonesia, sebagai negara besar di ASEAN, bisa memulai dan mengambil prakarsa dalam mewujudkan gagasan itu.***

==========

Penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.